



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Organisasi | Pemerintah Kabupaten Bangli |
| 2. Visi | Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang “Gita Shanti” |
| 3. Misi | <ol style="list-style-type: none">1. Membangkitkan perekonomian lokal2. Meningkatkan pendapatan asli daerah3. Pembenahan tata kelola objek wisata4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan5. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif9. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal |
| 4. Indikator Kinerja | |

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab Urusan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan	Konsumsi beras dari produksi sendiri	$\frac{\sum \text{Produksi beras}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produktivitas tanaman pangan	$\frac{\sum \text{Produksi tanaman}}{\sum \text{Luas tanaman}}$	Ton/Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produksi tanaman pangan unggulan	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produktivitas tanaman holtikultura per hektar	$\frac{\sum \text{Produksi tanaman}}{\sum \text{Luas tanaman}}$	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produktivitas tanaman holtikultura unggulan	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produktivitas tanaman holtikultura per hektar	$\frac{\sum \text{Produksi tanaman}}{\sum \text{Luas tanaman}}$	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produktivitas tanaman holtikultura unggulan	Luas panen x produktivitas	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pangan
		Produksi ikan per	$\sum \text{Produksi ikan}$	(Ton/Ha	Dinas Ketahanan	Kelautan dan

		hektar	\sum Luas panen		Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Perikanan
		Produksi ikan	\sum Produksi	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Kelautan dan Perikanan
		Produksi daging	\sum Produksi	Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Kelautan dan Perikanan
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\sum \frac{\text{Jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi}} \times 100\%$	%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
		Persentase pembangunan jalan dan jembatan	$\sum \frac{\text{Panjang jalan dan jembatan yang terbangun}}{\text{Jumlah pembangunan yang direncanakan}} \times 100\%$	%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
		Persentase drainase dalam kondisi baik	$\sum \frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Panjang saluran drainase}} \times 100\%$	%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
		Persentase turap dalam kondisi baik	$\sum \frac{\text{Panjang turap dalam kondisi baik}}{\text{Panjang turap}} \times 100\%$	%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase kelompok tani yang meningkat	$\sum \frac{\text{Kelompok tani yang ditingkatkan}}{\text{Kelompok tani}} \times 100\%$	%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat	Pertanian

	guna mendukung produktivitas perekonomian lokal	klas kemampuannya			Kabupaten Bangli	
		Persentase petani dgn pendapatan min 2 Juta	$\frac{\sum \text{Petani yang disurvei}}{\sum \text{Petani}} \times 100\%$	%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pertanian
		Produksi beras dikonsumsi sendiri (%)	$\sum \text{Produksi beras}$	%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pertanian
		Persentase skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% Angka Kering Giling x Bobot masing-masing kelompok pangan	%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Darat Kabupaten Bangli	Pertanian
		Persentase kelembagaan ekonomi pedesaan	$\frac{\sum \text{Lembaga perekonomian pedesaan}}{\sum \text{Lembaga ekonomi}} \times 100\%$	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun dari pajak daerah	$\frac{\text{PAD } n - \text{PAD } n-1}{\text{PAD } n} \times 100\%$	%	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Keuangan
		Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun dari retibusi daerah	$\frac{\text{PAD } n - \text{PAD } n-1}{\text{PAD } n} \times 100\%$	%	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Keuangan
		Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun dari Perusahaan Daerah (Perusda)	$\frac{\text{PAD } n - \text{PAD } n-1}{\text{PAD } n} \times 100\%$	%	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Keuangan

		dan kekayaan daerah yang dipisahkan				
		Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun dari lain-lain PAD yang sah	$\frac{\text{PAD } n - \text{PAD } n-1}{\text{PAD } n} \times 100\%$	%	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Keuangan
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun	$\frac{\text{PAD } n - \text{PAD } n-1}{\text{PAD } n} \times 100\%$	%	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Keuangan
		Jumlah PAD dari retribusi pariwisata	\sum Retribusi pariwisata dalam 1 tahun	M (Rp)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Pariwisata
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%$	%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air bersih	$\frac{\sum \text{RT pengguna air bersih}}{\sum \text{Seluruh RT}} \times 100\%$	%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna	Persentase tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	$\frac{\sum \text{Fasilitas yang diadakan}}{\sum \text{Fasilitas yang tersedia}} \times 100\%$	%	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli	Perhubungan

	mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)					
		Persentase pelanggaran lalu lintas	$\frac{\sum \text{Kecelakaan lalu lintas}}{\sum \text{Jumlah kendaraan}} \times 100\%$	%	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli	Perhubungan
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terintegrasi sistem	$\frac{\sum \text{PD yang sudah terintegrasi system IT Kabupaten}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli	Komunikasi dan Informasi
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase meningkatnya pendapatan masyarakat	$\frac{\sum \text{PKK desa yg tertib administrasi}}{\sum \text{Desa/kelurahan}} \times 100\%$	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase fakir miskin yang diberdayakan	$\frac{\text{Persentase penduduk miskin yang diberdayakan}}{\sum \text{Penduduk miskin}} \times 100\%$	%	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	Sosial
		Persentase menurunnya angka pengangguran terbuka	$\frac{\sum \text{Pengangguran terbuka}}{\sum \text{Angkatan kerja}} \times 100\%$	%	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	Tenaga Kerja
		Persentase meningkatnya kesempatan kerja	$\frac{\sum \text{Peningkatan kesempatan kerja}}{\sum \text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	%	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	Tenaga Kerja
	Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan pada lanjut usia	$\frac{\sum \text{Lanjut usia yang dilayani}}{\sum \text{Total lanjut usia}} \times 100\%$	%	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Kesehatan
		Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Kesehatan

		Persentase kepuasan pelayanan	$\frac{\sum \text{Jumlah pasien yang puas dilayani}}{\sum \text{Jumlah total pasien}} \times 100\%$	%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli	Kesehatan
		Angka kematian ibu	$\frac{D \text{ hamil}}{\text{Jumlah}} \times 1000$	%	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Kesehatan
		Angka kematian bayi	$\frac{D0-<1\text{th}}{\sum \text{Lahir hidup}} \times 1.000$	%	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Kesehatan
		Angka kematian balita	$\frac{D0-59}{\sum \text{Penduduk usia 0-59 Bulan}} \times 1.000$	%	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Kesehatan
	Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar	Persentase penduduk memiliki akta catatan sipil	$\frac{\sum \text{Penduduk berakta}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli	Kependudukan dan Capil
		Persentase Kecamatan layak anak	$\frac{\sum \text{Fasilitas umum untuk anak}}{\sum \text{Jumlah anak yang menggunakan fasilitas umum}} \times 100\%$	%	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	$\frac{\sum \text{KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun yang ditangani}}{\sum \text{KDRT yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif	$\frac{\sum \text{PUS}}{\sum \text{PUS yang ber KB}} \times 100\%$	%	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	$\frac{\sum \text{AKI}}{\sum 100.000 \text{ kelahiran}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{AKB}}{\sum 1.000 \text{ kelahiran}} \times 100\%$	%	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana

					Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima jaminan sosial	$\frac{\sum \text{PMKS yang dibantu}}{\sum \text{Total PMKS}} \times 100\%$	%	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	Sosial
		Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana	$\frac{\sum \text{Kejadian bencana yang ditangani}}{\sum \text{Komunitas masyarakat dan sarana yang ada di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
		Persentase meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	$\frac{\sum \text{Kejadian bencana yang ditangani}}{\sum \text{Komunitas masyarakat dan sarana yang ada di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	umum, dan pelindungan masyarakat
		Persentase penanganan darurat Bencana	$\frac{\sum \text{Kejadian bencana yang ditangani}}{\sum \text{Kejadian bencana}} \times 100\%$	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
		Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	$\frac{\sum \text{Objek terdampak yang ditangani}}{\sum \text{Keseluruhan objek yang terdampak}} \times 100\%$	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
		Jumlah transmigran terkirim per tahun	$\frac{\sum \text{KK transmigran terkirim per tahun}}{\sum \text{Kepala Keluarga (KK)}} \times 100\%$	Kali	Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	Transmigrasi
5	Meningkatnya manajemen pendidikan dan	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang itamatkan.Banyaknya		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten	Pendidikan

	pariwisata		murid usia 7-12, 13-15, 16-18 tahun		Bangli	
		Angka melek huruf	$\frac{\sum \text{Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis}}{\sum \text{Penduduk usia 15}^{\text{th}} \text{ ke atas}} \times 100$		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli	Pendidikan
		Jumlah pemustaka	\sum pengunjung yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Bangli	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli	Perpustakaan
		Persentase instansi pemerintah yang pengelolaannya kearispannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{PD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli	Arsip
		Jumlah kunjungan wisatawan ke Bangli	\sum Wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Bangli	Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli	Pariwisata
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH)	$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Lingkungan Hidup
		Persentase pengelolaan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang dikelola (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100\%$	%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum	\sum Produk Hukum yang ditetapkan	Produk Hukum yang ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Administrasi Pemerintahan Umum
		Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai Sistem	\sum Aparatur Sipil Negara yang terlayani sesuai SOP		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

		Operasional Prosedur (SOP)			Manusia Kabupaten Bangli	
		Jumlah layanan pegawai yang menggunakan web	\sum ASN yang di data dalam sistem informasi kepegawaian		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli	Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$(\sum \text{pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan} / \sum \text{total pejabat Perangkat Daerah yang ada}) \times 100\%$		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli	Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Desa dan Banjar yang di Bintek	$\sum \text{Pemerintahan/Lembaga Desa/kelurahan yang tertib Administrasi} / \sum \text{Desa/kelurahan} \times 100 \%$	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kategori sehat	$(\sum \text{LPD yang aktif} / \sum \text{LPD yang ada}) \times 100\%$	LPD	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Administrasi Pemerintahan Umum
		Persentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	$(\sum \text{Ormas yang terlibat} / \sum \text{Ormas}) \times 100\%$	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Persentase organisasi generasi muda yang memahami tentang	$(\sum \text{organisasi muda yang dibina} / \sum \text{organisasi muda}) \times 100\%$	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

		nasionalisme				masyarakat
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah menjadi kategori B	$(\sum \text{nilai Laporan Kinerja PD yang bernilai B} / \sum \text{PD yang membuat Laporan Kinerja}) \times 100\%$	%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Sekretariat Daerah
		Persentase inovasi pelayanan publik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah (PD) berinovasi}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Administrasi Pemerintahan Umum
		Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik kegiatan pembangunan tepat waktu	$\frac{\sum \text{PD yang melaporkan tepat waktu}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	%	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Administrasi Pemerintahan Umum
		Persentase izin dan non perizinan A yang diterbitkan	$\frac{\sum \text{Izin yang terbit}}{\sum \text{Berkas pemohon yang memenuhi syarat}} \times 100\%$	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Penanaman Modal
		Persentase izin dan non perizinan B yang diterbitkan	$\frac{\sum \text{Izin yang terbit}}{\sum \text{Berkas pemohon yang memenuhi syarat}} \times 100\%$	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Penanaman Modal

		Capaian Industri Kecil Menengah (IKM)	$\frac{\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total unsur yg terisi}} \times 100\%$	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Penanaman Modal
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Keuangan
		Kesesuaian Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	$\frac{\sum \text{Program sesuai}}{\sum \text{Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD}} \times 100\%$	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Perencanaan
		Persentase usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang diserap dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	$\frac{\sum \text{Usulan yang terserap}}{\sum \text{Usulan}} \times 100\%$	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Perencanaan
		Jumlah kajian/ Penelitian yang dilaksanakan	$\frac{\sum \text{Dokumen kajian/penelitian yang disusun pertahun}}{\sum \text{Jumlah kajian/penelitian yang disusun sampai dengan akhir tahun}} \times 100\%$	Buah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	Perencanaan
		Persentase	$\sum \text{Asset yang sudah terkelola} \times 100 \%$	%	Bagian Umum	Sekretariat

		pengelolaan barang/ jasa dan aset	\sum Asset		Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Daerah
		Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai >B hasil penilaian Inspektorat	$(\sum \text{perangkat daerah yang mendapat nilai } >B / \sum \text{Perangkat Daerah}) \times 100\%$	%	Inspektorat Kabupaten Bangli	Pengawasan
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	$(\sum \text{rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti di tahun yang bersangkutan} / \sum \text{akumulasi rekomendasi hasil pemeriksaan}) \times 100\%$	%	Inspektorat Kabupaten Bangli	Pengawasan
		Persentase ketepatan waktu penyampaian LPPD dan LKPJ Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan Tepat waktu}}{\sum \text{Laporan}} \times 100\%$	%	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Administrasi Pemerintahan Umum
		Persentase Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli yang dapat diakses publik	$\frac{\sum \text{Kegiatan yang dipublikasikan}}{\sum \text{Kegiatan}} \times 100\%$	%	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Administrasi Pemerintahan Umum
	Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{Pelanggaran PERDA dan PERKADA}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Penegakan PERDA dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Persentase masyarakat yang	$\frac{\sum \text{Masyarakat yang menggunakan hak suara}}{\sum \text{Pemilih}} \times 100\%$	%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Ketenteraman, ketertiban

		menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu			Kebakaran Kabupaten Bangli	umum, dan perlindungan masyarakat
8	Meningkatnya kinerja Koperasi, Usaha Koperasi Mikro Menengah, Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Kontribusi sektor industr terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\sum \text{Total PDRB}} \times 100 \%$	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	Perindustrian
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\sum \text{Total PDRB}} \times 100\%$	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	Perindustrian
		Persentase peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yg memiliki daya saing	$\frac{\sum \text{UMKM yang legal dan mampu bersaing}}{\sum \text{Semua UMKM}} \times 100 \%$	%	Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	Usaha Kecil Menengah
		Persentase peningkatan jumlah UMKM yg punya legalitas usaha	$\frac{\sum \text{UMKM yang legal}}{\sum \text{Semua UMKM}} \times 100 \%$	%	Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	Usaha Kecil Menengah

		Persentase peningkatan koperasi aktif dan berkualitas	$\frac{\sum \text{Koperasi aktif dan berkualitas}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100 \%$	%	Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	Usaha Kecil Menengah
		Jumlah Investor	$\sum \text{Investor (PMA/PMDN)}$	Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Penanaman Modal
		Jumlah Investor wajib LKPM	$\sum \text{Investor wajib LKPM}$	Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Penanaman Modal
		Nilai investasi	$\sum \text{Nilai Investasi (PMA/PMDN)}$	M (Rp)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	Penanaman Modal
9	Meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase lembaga adat yg lestari	$\frac{\sum \text{Jumlah lembaga Adat yang aktif}}{\sum \text{Total desa}} \times 100\%$	%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Kebudayaan
		Persentase sekaa kesenian yang dibina melalui pentas kesenian	$\frac{\sum \text{Pementasan}}{\sum \text{Total sekeaa}} \times 100\%$	%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Kebudayaan
		Persentase situs benda cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\sum \text{Jumlah situs/benda yang dicatat}}{\sum \text{Rencana penelitian}} \times 100\%$	%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Kebudayaan
		Persentase sekaha teruna yang dilestarikan	$\frac{\sum \text{Jumlah sekaha Teruna yang aktif}}{\sum \text{Total banjar}} \times 100\%$	%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Kebudayaan

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGLI NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016-2021

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KEPALA (.....nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI
NOMOR :/...../

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (... nama Perangkat Daerah ...) KABUPATEN BANGLI

KEPALA (..... nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang: a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (... nama Perangkat Daerah..) Kabupaten Bangli ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (.. nama Perangkat Daerah ...) Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (... nama Perangkat Daerah..) Kabupaten Bangli;
- c. perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (... nama Perangkat Daerah..) Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (..... nama Perangkat Daerah.....);

Mengingat : 1.

2.

3.

4. dst

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mengubah Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangli dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan (..... nama Perangkat Daerah.....) Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2017

KEPALA (..... NAMA PERANGKAT
DAERAH.....)
KABUPATEN BANGLI,

(NAMA LENGKAP DAN TITEL)
(NIP.)
(PANGKAT)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-
 2021

TUGAS POKOK
 FUNGSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB	RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN	SATUAN
1.	Pendidikan	Pendidikan Usia Dini	Wajib Pendidikan	Bidang Kurikulum	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada Jenjang TK/PG/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$	
		% Penduduk yang berusia > 15 Tahun	Wajib Pendidikan			
		APK/APM SD/M1/Paket A	Wajib Pendidikan			
		APK/APM SMP/MTs/ Paket B	Wajib Pendidikan			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	BIDANG/UNIT PENANGGUNGJAWAB	RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN	SATUAN
		APK/APM SMA/SMK/MA/Paket C	Wajib Pendidikan			

KEPALA (... NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN BANGLI,

(NAMA LENGKAP DAN TITEL)
(NIP.)
(PANGKAT)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR